

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini membahas tentang pengaruh antara identitas nasional dan toleransi beragama terhadap paham radikalisme. Untuk itu, dalam landasan teori ini dibahas teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian tersebut.

2.1.1 Konsep Keamanan Nasional

Konsep keamanan dapat dipandang dari berbagai dimensi, yang pertama yakni dimensi *the origin of threats*. Dimensi ini menjelaskan mengenai sumber ancaman. Pada masa perang dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi oleh suatu negara selalu dianggap datang dari pihak eksternal. Namun, seiring perkembangan lingkungan strategis, maka ancaman-ancaman yang dihadapi oleh suatu negara dapat berasal dari lingkungan domestik dan global. Ancaman berkaitan dengan isu-isu primordialisme misalnya etnis, budaya, agama yang termanifestasikan dalam konflik komunal. Dimensi yang kedua yakni *the nature of threats*. Dimensi ini merupakan ancaman yang bersifat militer, tetapi berbagai perkembangan nasional dan internasional telah mengubah sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit. Sehingga, keamanan menjadi lebih komperhensif karena menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, demokratisasi dan pelanggaran HAM (Perwita, 2018).

Chalk (dalam Perwita, 2018) mengatakan bahwa fenomena global kontemporer diwarnai fenomena abu-abu. Fenomena ini didefinisikan sebagai ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional, dan internasional yang disebabkan oleh proses interaksi aktor negara dan non-negara. Sehingga, isu-isu yang muncul pun semakin beragam, seperti halnya konflik SARA, ketidakamanan ekonomi dan degradasi lingkungan (termasuk pula kemungkinan penggunaan senjata pemusnah masal seperti senjata biologi dan kimia oleh aktor negara maupun non-negara.

Dimensi ketiga yakni *changing responsibility of security*, bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara merupakan organisasi politik terpenting memiliki kewajiban untuk menyediakan keamanan bagi seluruh warga negara (Perwita, 2018).

Sementara itu, para penganut konsep keamanan non-tradisional menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Dimensi terakhir adalah *core values of security*. Pendekatan non-tradisional melihat mengemukanya nilai-nilai baru baik dalam tataran individu maupun global yang membutuhkan perlindungan. Nilai-nilai baru ini kerap disebut sebagai keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional antara lain berupa penghormatan terhadap HAM, demokrasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas baik itu perdagangan narkoba, pencucian uang hingga terorisme (Perwita, 2018).

Pada dasarnya, belum ada definisi standar untuk keamanan nasional (Wahid, 2016). Namun, banyak ahli yang mencoba memberikan definisi keamanan nasional. Wolfers (1973) mengatakan bahwa keamanan mengacu pada tingkat perlindungan dari nilai yang direalisasikan sebelumnya. Keamanan adalah nilai yang sering disebut sebagai nilai instrumental. Keamanan juga dapat bervariasi secara berbeda. Pada saat yang bersamaan, beberapa individu, kelompok, atau bangsa mungkin lebih aman daripada yang lain karena alasan yang berbeda-beda. Tingkatan bahaya atau ancaman, jumlah nilai yang dilindungi berbeda, dan keadaan psikis dan harapan untuk masa depan tidak dapat dibandingkan.

Menurut Holmes (2015), keamanan nasional merupakan upaya suatu negara untuk melindungi rakyat dan wilayahnya dari ancaman militer dan non-militer. Senada dengan hal tersebut, Bantarto (2005) mengatakan bahwa keamanan nasional adalah upaya pemerintah untuk menjaga kehidupan warga negara dan keamanan negara yang tidak

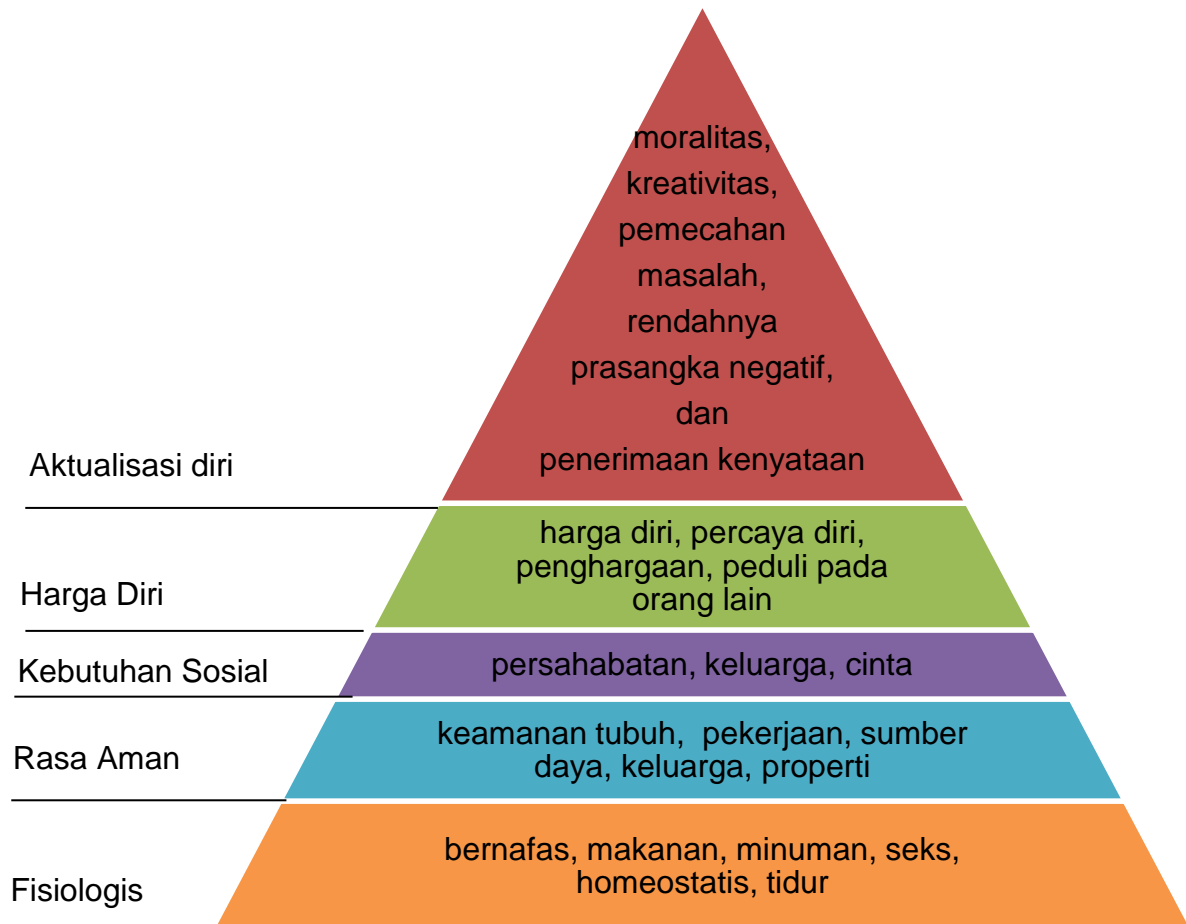
terbatas pada penyelenggaraan kekuatan diplomatik, ekonomi dan militer, baik dalam situasi damai maupun perang.

Sehingga, dapat dipahami bahwa keamanan nasional mempunyai dua makna penting, pertama adanya suatu usaha yang bertujuan melindungi rakyat Indonesia; dan yang kedua, yaitu adanya rasa aman bagi masyarakat yang dilindungi. Rasa aman dalam hal ini adalah rasa aman pada semua aspek kehidupan bernegara baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat (Motrantama & Yani, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa radikalisme merupakan ancaman terhadap keamanan non-tradisional. Dapat diketahui bahwa radikalisme merupakan ancaman yang nyata bagi Indonesia. Dilihat dari segi keamanan, masyarakat merasa terganggu akan rasa aman di negaranya sendiri. Berbagai aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena diliputi oleh kecemasan dan ketakutan terhadap aksi radikal. Hal ini tentu berdampak pada berbagai masalah di dalam masyarakat. Berbagai tindakan radikal dengan jelas nampak di masyarakat telah menjadi ancaman bagi keselamatan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Sebagai bagian dari kehidupan nasional, ancaman terhadap keamanan terhadap warga negara juga berarti ancaman terhadap keamanan nasional.

2.1.2 Hierarki Kebutuhan Dasar Maslow

Maslow mengemukakan bahwa terdapat lima kebutuhan dasar yang ada pada manusia, yang dimulai dengan kebutuhan akan makanan, air, dan tempat tinggal, diikuti oleh kebutuhan akan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial, harga diri, dan pemenuhan pribadi dan aktualisasi diri (Danesh, 2011).



Gambar 2. 1 Hierarki Kebutuhan Maslow

Sumber : Ardnt, et al., (2010)

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, Maslow mengemukakan kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan tingkat terendah yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, seperti makan, aktivitas seksual, tidur, dan kebutuhan homeostatis. Manusia terus berusaha mempertahankan homeostatis yang terdiri dari psikologis dan stabilitas fisiologis. Bernafas, makan, minum, tidur merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan fisik homeostatis. Perilaku yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ini memberikan rasa melindungi dan keseimbangan bagi individu. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan akan rasa aman meningkat dan menjadi motivasi utama dalam

perilaku individu. Maslow mengatakan bahwa keamanan tubuh, pekerjaan, sumber daya, moralitas, keluarga, properti merupakan kebutuhan akan keamanan. Ketika individu terancam keamanannya, maka dia semakin fokus untuk memulihkan diri dan lebih fokus untuk menghindari bahaya (Cunningham dalam Ardnt, et al., 2010).

Kebutuhan pada tingkat ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial meliputi perasaan memiliki, cinta, dan persahabatan. Mencari ikatan dengan orang lain merupakan dasar dari kebutuhan sosial. Beraneka ragam jenis hubungan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Meskipun manusia telah berevolusi dan teknologi telah mengurangi kebutuhan untuk hidup berkelompok, namun kebutuhan akan rasa memiliki masih mendominasi perilaku manusia.

Ketika kebutuhan sosial terpenuhi, keinginan untuk dihargai meningkat atau hal tersebut merupakan keinginan manusia untuk diterima dan dihargai oleh orang lain. Perkembangan harga diri mengarah pada rasa percaya diri, kekuatan, dan nilai. Manusia yang dapat memenuhi kebutuhan harga dirinya cenderung dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat. Maslow (dalam Ardnt, et al., 2010) mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki harga diri yang tinggi cenderung menarik diri dari masyarakat dan menjadi semakin putus asa.

Tingkat kebutuhan yang terakhir dan dapat dibilang yang paling sulit diraih adalah aktualisasi diri yang memastikan seseorang mampu memenuhi potensi yang dimiliki. Seperti yang didefinisikan oleh Maslow bahwa aktualisasi diri berarti individu dapat mencapai moralitas, kreativitas, spontanitas, pemecahan masalah, rendahnya prasangka negatif, dan penerimaan fakta. Lingkungan yang kurang mendukung individu dalam mencapai aktualisasi dirinya akan menghambat individu untuk mencapai aktualisasi tersebut (Parker, 2009).

Berdasarkan hierarki kebutuhan dasar manusia yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa perilaku radikal yang dilakukan oleh individu disebabkan karena berbagai motivasi yang berbeda.

Munculnya radikalisme bagaimanapun tidak dapat di persempit menjadi satu penyebab tunggal. Motivasi yang dimiliki oleh individu memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan seseorang menjadi radikal.

Dalam hierarki kebutuhan dasar manusia, dapat diketahui bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan universal yang mendasar dan ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka berbagai persoalan kemungkinan akan terjadi. Seperti diketahui bahwa tingkat kebutuhan terendah Maslow yaitu kebutuhan fisiologis. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memotivasi individu agar bergabung dengan kelompoknya. Mereka menarik masyarakat yang menggugur dan miskin dengan cara memberikan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman serta memenuhi kebutuhan paling dasar bagi keluarga mereka yaitu dengan menyekolahkan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kelompok radikal juga menggunakan proses keterlibatan sosial yang memperkuat ikatan individu dengan kelompok.

2.1.3 Teori Tindakan Sosial

Hewii (2015) mengatakan bahwa teori tindakan sosial memberi peneliti pemahaman tentang tindakan di balik perilaku manusia, yang mungkin tradisional, afektif, nilai, atau rasional. Tokoh utama dari teori tindakan sosial yaitu Max Weber. Dalam tindakan individu, ia klasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu *zwecrational*, *wertrational action*, *affectual action*, dan *traditional action* (Fadly, 2016). *Zwecrational* (rasionalitas nilai) yaitu tindakan yang berkenaan dengan harapan individu tentang perilaku orang lain dan memperhitungkan nilai dari harapan ini untuk mencapai hasil yang mereka pilih secara rasional. *Wetrational* merupakan tindakan di mana individu memperhitungkan nilai-nilai absolut (keyakinan, etika, estetika, atau bentuk perilaku lain) sepenuhnya untuk kepentingan mereka sendiri dan terlepas dari manfaat atau keberhasilan eksternal. Tindakan afektif individu didasarkan pada perasaan dan emosi

individu. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang didasarkan pada kebiasaan yang telah terpelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tindakan tradisional terjadi ketika tujuan dan sarana tindakan didasarkan oleh adat dan tradisi (Emmanuel, 2016).

Individu atau kelompok yang menganut paham radikal ditandai dengan keengganan menerima sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Mereka memiliki keyakinan bahwa pandangan mereka terhadap semua manusia dan dunia adalah benar dan tidak ada seorang pun berhak menentang pandangan ini. Namun, pemikiran dan pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku dalam kehidupan umat beragama yang beragam tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Adanya konflik dan kekerasan yang timbul karena adanya perbedaan dalam keyakinan, penggunaan simbol keagamaan untuk kepentingan tertentu, dan pendirian tempat ibadah dapat menimbulkan reaksi negatif dari kelompok lain. Sehingga, tindakan-tindakan yang demikian bukanlah suatu tindakan yang rasional.

Keputusan individu untuk melakukan aksi radikal dapat terjadi oleh tindakan afektif yang didasari atas sebab emosional. Emosi keagamaan yang ada pada masyarakat kemudian menjadi dasar munculnya berbagai aktivitas keagamaan yang merugikan masyarakat lain. Emosi keagamaan diawali oleh interaksi sosial dalam suatu kelompok itu sendiri yang didasari atas motivasi pada kepentingan masing-masing kelompok, sebagai pemicu lahirnya sentimen antarkelompok. Gerakan emosi keagamaan ini biasanya dituangkan dalam bentuk gerakan radikal yang menggunakan simbol keagamaan dengan dalih membela agama.

2.1.4 Radikalisme

Pada teori radikalisme, peneliti menguraikan mengenai pengertian radikalisme, dimensi radikalisme, dan faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme.

2.1.4.1 Pengertian Radikalisme

Definisi radikalisme pada umumnya berpusat pada dua fokus yaitu pada radikalisme kekerasan dan pada pengertian radikalisme yang lebih luas. Menurut Badan Intelejen Denmark (PET), radikalisme kekerasan merupakan proses di mana individu menggunakan tindakan yang tidak demokratis atau kekerasan, termasuk terorisme untuk mencapai tujuan politik/ideologis tertentu (Veldhuis & Staun, 2009). Sementara itu, radikalisme non-kekerasan menurut Badan Intelejen Belanda (AIVD) adalah dukungan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai perubahan dalam masyarakat (baik kekerasan maupun non-kekerasan) yang mana hal tersebut membahayakan tatanan hukum yang demokratis (Veldhuis & Staun, 2009). Dari hal ini, dapat diketahui bahwa definisi untuk radikalisme kekerasan berfokus pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan, pada definisi radikalisme yang lebih luas yaitu kesediaan secara aktif untuk mendukung perubahan luas dalam masyarakat yang pada dasarnya tidak berfokus pada tindakan kekerasan, tetapi pada pandangan atau pendapat radikal yang tidak diikuti oleh kekerasan.

Senada dengan pendapat tersebut, Bakti (2014) mengatakan bahwa radikalisme diklasifikasikan dalam dua aspek yaitu melalui pemikiran dan tindakan. Radikalisme yang bersifat pemikiran merupakan suatu ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme terwujud dalam berbagai aksi dan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya, baik dibidang keagamaan, sosial politik, dan ekonomi.

Zen (2012) mengatakan bahwa akar dari ideologi radikal adalah fanatisme agama atau kepercayaan yang menyimpang. Lebih lanjut, Martanto, et al., (2019) mengatakan bahwa proses radikalisme menyasar ranah kognitif yaitu pada kesadaran dan cara pandang individu dan

kelompok terhadap kondisi yang dialami saat ini, sehingga untuk mengaktualisasikan tujuan perlu menggunakan kekerasan atau tanpa kekerasan seperti menggunakan lisan maupun tulisan.

Wiktorowicz (dalam Schmid, 2013) menyatakan bahwa proses radikalisme diawali ketika individu mulai membuka dirinya terhadap paham dan dunia baru yang dianggap benar sehingga meninggalkan pandangan lamanya. Tahap ini disebut sebagai *cognitive opening*. Menurut Wiktorowicz (dalam Schmid, 2013), keluhan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan personal merupakan faktor-faktor luar yang mendorong individu bergabung ke dalam kelompok radikal. Tahap selanjutnya adalah *religious seeking*. Pada tahap ini, individu mulai mencari makna dari keagamaan. Mereka mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti diskusi maupun ceramah, baik secara terbuka maupun tertutup.

Borum (2004) menambahkan bahwa proses perkembangan ideologi radikal dimulai dari sekelompok atau individu yang mendefinisikan peristiwa atau keadaan tertentu sebagai hal yang tidak diinginkan. Kondisi yang tidak diinginkan tersebut tidak hanya dianggap sebagai ketidakadilan, tetapi juga dikaitkan dengan tanggung jawab dari pihak tertentu. Hal itu dianggap buruk, sehingga perilaku agresi lebih mudah terjadi dan dibenarkan.

Dari berbagai pendapat ahli tentang definisi radikalisme dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah kesediaan secara aktif dari individu atau kelompok untuk mendukung perubahan yang luas pada masyarakat, dengan cara apa pun, tetapi tidak eksklusif pada kekerasan melainkan berfokus pada non-kekerasan berupa pandangan atau pendapat radikal.

2.1.4.2 Dimensi-Dimensi Radikalisme

Saroglou (2011) mengemukakan bahwa secara umum perilaku individu untuk beragama berhubungan dengan motif agama, tetapi cara mengekspresikan agama tersebut dipengaruhi oleh budaya. Adapun

dimensi universal dari tindakan beragama adalah *believing*, *bonding*, *behaving*, dan *belonging*. Dimensi *believing* mengacu pada aspek kognitif agama, yaitu keyakinan individu yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan, cita-cita kebenaran, terutama mengenai pertanyaan-pertanyaan besar yang eksistensial, motif dan fungsi seperti pencarian makna. Dimensi *bonding* mengacu pada aspek emosional yang melibatkan individu atau kelompok dengan Tuhan, dewa-dewa atau sejenisnya. Kelompok keagamaan menunjukkan kualitas stabilitas emosional dan mental yang berbeda dalam beragama.

Dimensi behaving mengacu pada aspek moral agama, yang menyiratkan norma-norma dan aturan moral, cita-cita yang mulia, kemurnia, moral yang baik, dan pengendalian diri serta nilai-nilai hierarki. Sementara itu, dimensi *belonging* mengacu pada aspek sosial agama, yang ditunjukkan dengan menjalin hubungan dan mengidentifikasi diri dengan kelompok, mulai dari hubungan kekeluargaan alami hingga hubungan yang melampaui batas etnis, bahasa, maupun geografi.

Mas'ud (2016) mengatakan bahwa kelompok dengan paham radikalisme memiliki ciri-ciri, yaitu (1) menginginkan syariat Islam sebagai hukum negara, (2) berprinsip praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (*salafy*), (3) cenderung memusuhi barat, serta (4) perlawanan terhadap liberalisme Islam yang tengah berkembang di Indonesia. Sedangkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2012) mengidentifikasi empat kriteria radikalisme beragama, yaitu (1) keinginan untuk melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan atas nama agama, (2) mengkafirkan orang lain, (3) setuju dengan adanya ISIS, dan (4) setuju dengan jihad.

Adapun dimensi yang mewakili paham radikalisme beragama dari berbagai teori radikalisme yaitu (1) menginginkan syariat Islam sebagai hukum negara, (2) cenderung memusuhi barat, (3) keinginan untuk melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan atas nama agama, dan (4) mengkafirkan orang lain.

2.1.4.3 Faktor-faktor Penyebab Radikalisme

Radikalisme tidak disebabkan karena hal tunggal, melainkan disebabkan karena hal yang sangat beragam. Menurut Usman (2004) faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme yaitu:

a. Kondisi Sosial Politik

Perubahan struktur politik karena politik globalisasi akan berimplikasi pada bentuk-bentuk keagamaan di era kontemporer. Globalisasi politik akan melahirkan perbedaan yang kuat dalam masyarakat yang diuntungkan dari politik globalisasi maupun tidak mendapatkan keuntungan yang cukup, menyebabkan perlawanan terorganisir terhadap masyarakat, mengatur tindakan secara sistematis, dan bersimpati kepada mereka yang ide dan pendapat yang sama sebagai sebuah aktivitas perlawanan. Perlawanan akan semakin terasa jika kondisi sosial politik yang dihadapi semakin tampak dilihatnya tidak memihak kepada kelompoknya, terutama ketika mereka merupakan kelompok mayoritas (Beyer, 2003).

b. Ekonomi

Rendahnya tingkat ekonomi yang dapat memunculkan kemiskinan seringkali dipandang sebagai sumber radikalisme. Ketimpangan ekonomi yang terjadi selama ini dengan cenderung menciptakan masalah sosial. Dari sudut pandang sosiologis, ketimpangan ekonomi menciptakan ketidakadilan sosial bagi mereka yang berkecukupan secara ekonomi. Sehingga, ketidakadilan sosial dengan mudah muncul dan kemudian mengorganisir masyarakat. Dinamika ekonomi masyarakat mendorong individu untuk terlibat dalam komitmen keagamaan, sehingga individu dan kelompok dengan tingkat ekonomi rendah, memungkinkan kedua sikap keagamaan tersebut muncul secara bersamaan.

c. Identitas sosial

Identifikasi dengan kelompok sosial merupakan indikator yang berhubungan dengan perilaku sosial (Veldhuis & Staun, 2009). Menurut Cruwys, et al., (2014) identitas sosial memberikan arti pentingnya mengidentifikasi individu dengan kelompok yang mereka ikuti. Identitas sosial merupakan ciri khas yang membedakan keanggotaannya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Individu dengan identitas sosial yang kuat terhadap kelompoknya, dapat menimbulkan keinginan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan kelompoknya. Oleh karena itu, identitas sosial merupakan jembatan antara individu dan kelompok. Selain itu, pengaruh sosial dan sistem kepercayaan sosial membentuk pemikiran, perhatian, dan perilaku individu.

d. Kondisi psikologis

Kaum muda merupakan masa yang ditandai dengan kondisi psikologis yang masih rentan, karena mengalami tekanan dalam hidup yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu gangguan dalam psikologis yaitu depresi. Ini merupakan hasil dari ketidaksiapan individu melawan kegagalan dalam hidup, kebahagiaan yang tidak dapat dicapai, memiliki kehidupan pernikahan atau berpasangan dengan pasangan yang tidak membahagiakan, kebosanan yang mendalam, serta penyebab depresi lainnya. Kondisi psikologis sangat berhubungan erat dengan kondisi psikis.

e. Emosi keagamaan

Emosi sering kali dilihat sebagai faktor pendorong dibalik perilaku sosial. Smith (1993) mengatakan bahwa individu bahkan tidak harus menjadi pribadi yang terlibat dalam peristiwa yang membangkitkan emosi untuk mengalami yang sesuai emosinya. Emosi keagamaan dalam suatu masyarakat

merupakan suatu getaran yang dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan aktivitas keagamaan. Sarraj (2002) menuturkan bahwa perasaan bersalah, malu, dan keinginan untuk membalas dendam adalah penyebab utama ekstrimisme.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan radikalisme adalah identitas sosial. Salah satu bentuk identitas sosial adalah identitas nasional. Ketika identitas nasional yang dimiliki oleh individu rendah, maka pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan keterikatan yang kuat dengan identitas agama mereka sehingga hal ini rentan terjadi radikalisme. Selain itu, toleransi beragama yang rendah juga menjadi pemicu adanya radikalisme. Hal ini dapat terjadi ketika emosi kemarahan pada individu atau kelompok diperlihatkan secara terang-terangan oleh kelompok gerakan yang muncul masyarakat dengan yang mengatasnamakan agama karena diakibatkan oleh perbedaan yang ada diantara mereka. Dengan demikian, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H3 : Identitas nasional dan toleransi beragama secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.

2.1.5 Identitas Nasional

Pada teori identitas nasional, peneliti menguraikan mengenai pengertian identitas nasional, aspek-aspek identitas nasional, dan faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan identitas nasional.

2.1.5.1 Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas sosial (Arief, et al., 2021). Guibernau (2007) mendefinisikan identitas nasional sebagai sentimen kolektif yang didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki bangsa yang sama dan atribut yang membuatnya berbeda dari bangsa lain.

Senada dengan pendapat tersebut, Barret & Davis (2008) mendefinisikan identitas nasional sebagai seperangkat pengetahuan dan emosi yang mengekspresikan hubungan individu dengan bangsa. Lebih mendalam, Barret (2005) menjelaskan bahwa identitas nasional adalah konsep kompleks yang mencakup komponen (1) keyakinan subjektif (kategorisasi diri) terhadap suatu bangsa, (2) rasa afiliasi nasional yang kuat sebagai bagian dari identitas individu, (3) emosi baik positif maupun negatif terhadap bangsa, (4) stereotip mengenai ciri-ciri yang mereka miliki sebagai kelompok nasional, (5) pengalaman subjektif tentang persepsi diri sendiri dengan anggota kelompok lain, (6) pendapat subjektif mengenai tujuan dan masalah yang dihadapi bangsa, (7) pengetahuan dan kemauan untuk memahami budaya dan nilai-nilai nasional serta adanya kepatuhan untuk menaati norma yang berlaku.

Tartakovsky (2010) mengatakan bahwa identitas nasional merupakan konstruksi subjektif yang berbeda dengan konsep kebangsaan, dan merupakan penanda objektif dari kepemilikan individu terhadap suatu bangsa. Kebangsaan biasanya ditentukan oleh negara melalui pendaftaran resmi dan penerbitan dokumen yang relevan.

Senada dengan hal tersebut, identitas nasional dapat menjadi kekuatan yang dapat mengurangi konflik etnis. Dengan merasa menjadi bagian dari suatu negara dan sesama warga negara, individu akan cenderung mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa identitas nasional dapat membantu masyarakat memprediksi preferensi kebijakan. Selain itu, dalam sektor ekonomi atau perilaku konsumen, keterikatan individu dengan identitas nasional juga dapat membantu menganalisis memprediksi preferensi mereka untuk produk nasional. Bagi individu yang sepanjang hidupnya tinggal di suatu negara tertentu, kemungkinan identitas nasional akan tertuju pada negara tersebut. Namun, bagi mereka yang memiliki kehidupan di lebih dari satu negara, identitas nasional mungkin masih dipertanyakan (Transue dalam Windari).

Dapat diketahui bahwa identitas nasional merupakan penentu identitas suatu negara dan menjadi faktor yang membedakannya dengan negara lain (Smith, 1991). Ini diperkuat oleh He & Yan (2008) yang mengatakan bahwa identitas nasional mengacu pada identitas warga negara yang meliputi tradisi sejarah dan budaya negara, nilai moral, cita-cita, keyakinan, kedaulatan negara dan sebagainya, serta mereka percaya bahwa mereka milik suatu negara. Identitas nasional juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjadi kepentingan negara. Pada dasarnya, negara tidak akan mengejar kepentingan yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa, karena tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat negara tersebut.

Terdapat tiga aspek identitas nasional yang ada di Indonesia. Aspek yang pertama adalah identitas dasar yaitu Pancasila yang berfungsi sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, dan paradigma pembangunan sebagai suatu bangsa. Kedua, identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, bendera merah putih, Bhineka Tunggal Ika, dan lagu Indonesia Raya. Aspek yang ketiga adalah identitas alamiah yakni negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki keberagaman pada suku, budaya, serta agama di Indonesia (Erwin, 2013).

Berdasarkan definisi identitas nasional yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu pengetahuan untuk memahami budaya dan nilai-nilai nasional serta emosi untuk berhubungan dengan bangsa.

2.1.5.2 Aspek-aspek Identitas Nasional

Identifikasi individu dengan bangsa mencerminkan sejauh mana dimensi identitas nasional muncul secara keseluruhan terhadap identitas individu. Phinney dan Devich-Navarro's (1997) menjelaskan terdapat tiga aspek identitas nasional, yaitu:

- a. *Affirmation and sense of belonging*

Dimensi ini diartikan sebagai rasa memiliki seseorang terhadap kelompok, bangsanya dan sikap serta perasaan individu tersebut sebagai anggota dalam suatu bangsa.

b. *Exploration*

Eksplorasi merupakan rasa ingin tahu seseorang untuk mempelajari kelompoknya hingga rasa tersebut memunculkan keinginan individu untuk berpartisipasi ke dalam kegiatan bangsanya.

c. *Behavior*

Diartikan sebagai pola tingkah laku yang memiliki karakteristik tersendiri yang ada pada suatu kelompok negara tertentu. Gambaran tingkah laku ini tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti adat-istiadat, budaya, dan kebiasaan. Misalkan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan masyarakat yang sopan santun, menghormati orang tua, senang membantu orang lain, memiliki jiwa gotong royong, dan lain sebagainya. Sehingga, pola perilaku ini menjadi identitas bagi bangsa Indonesia.

2.1.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan Identitas Nasional

Smith (1991) menuturkan bahwa pembentukan identitas suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal suatu negara, tetapi pada prinsipnya, faktor yang berasal dari dalam negara memegang peranan penting didalamnya. Adapun hal yang paling jelas dan mendasar pada pembentukan identitas nasional adalah gender. Klasifikasi gender bersifat universal dan meresap. Gender menentukan peran apa yang dimainkan suatu aktor dalam memperoleh hak dan memenuhi semua kewajibannya. Terpisah secara geografis serta dibagi berdasarkan kelas dan terfragmentasi secara etnis, gender perlu untuk melibatkan diri mereka

dengan identitas lain yang lebih kohesif agar mereka dapat bertindak dan menginspirasi kesadaran kolektif.

Faktor yang kedua adalah peranan secara teritorial. Setiap individu mempunyai peranan masing-masing dalam suatu bidang bergantung dalam wilayah yang ditempatinya. Wilayah dapat dengan mudah terfragmentasi menjadi lokal dan daerah dengan mudah menjadi pemukiman yang terpisah. Dalam banyak kasus regionalisme, diketahui bahwa mereka tidak mampu mempertahankan mobilitas populasinya dengan berbagai masalah yang ada. Smith (1991) mengatakan bahwa identitas nasional yang tinggi dapat terbentuk dengan baik dalam mobilisasi yang terjadi secara berkala pada saat krisis dan khususnya dalam situasi seperti konflik. Dalam banyak kesempatan, Smith (1991) juga menuturkan bahwa kesediaan individu untuk mati demi bangsa merupakan indikator dari solidaritas nasional dan kekuatan identitas nasional. Ketiga, peranan sosio-ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat untuk menggambarkan kelas yang dimiliki masyarakat tersebut. Faktor keempat adalah peranan sosio-religius yang berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki oleh individu sehingga mempengaruhi interaksinya dengan individu lain.

Senada dengan hal ini Tartakovsky (2010), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi identitas nasional yaitu pendidikan, ekonomi, orang tua dan teman sebaya. Sistem pendidikan, memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional dan menciptakan nasionalisme, mendefinisikan nilai, tujuan nasional, dan norma perilaku. Selain itu, pendidikan dalam suatu negara juga berperan untuk rasa kepemilikan terhadap negara sehingga ia rela berkorban demi kebaikan bangsa.

Selain itu, pengaruh ekonomi juga berkontribusi terhadap identitas nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Tartakovsky tahun 1999-2007 di Rusia dan Ukraina menemukan bahwa peningkatan sikap pada remaja terhadap negara berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi di

negara, tetapi tidak berkontribusi dalam tingkat identifikasi dengan bangsa. Hal ini kemungkinan disebabkan karena waktu yang pendek pada penelitian pertama, sehingga perubahan ekonomi tidak cukup menonjol untuk mempengaruhi identitas nasional pada remaja. Namun, hasil penelitian kedua menemukan bahwa perubahan ekonomi cukup berkontribusi terhadap menguatkan keterikatan kelompok terhadap bangsa.

Faktor ketiga, yaitu pengaruh orang tua dan teman sebaya. Orang tua mengajari anak-anak mereka bagaimana mereka harus membangun hubungan dengan bangsa mereka dan bangsa lain. Anak-anak menerima informasi dari orang tua mereka secara emosional tentang diri mereka dan orang lain tentang bangsa. Pengaruh orang tua terhadap identitas nasional mungkin paling kuat di negara-negara yang berkonflik dengan negara tetangga. Pengaruh teman sebaya terhadap identitas nasional yaitu dengan mendorong dan membentuk sikap yang positif terhadap negara. Selain itu, model hubungan internal yang positif dengan teman-teman juga dapat ditransfer kepada seluruh masyarakat. Sementara itu, remaja sekolah menengah yang membentuk kelekatan dengan teman sebayanya, akan lebih memiliki sikap yang lebih positif terhadap negara dibanding remaja yang memiliki gaya pertemanan yang negatif.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor yang membentuk identitas nasional yaitu gender, peran territorial, peran sosio-ekonomi, dan sosio-religius. Dari teori identitas nasional yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa identitas nasional merupakan seperangkat pengetahuan dan emosi yang dimiliki oleh individu dan mengekspresikan hubungan individu dengan bangsa. Dapat dipahami bahwa ketika identitas nasional yang dimiliki oleh individu atau kelompok tinggi maka akan memberikan dukungan yang besar kepada negaranya. Namun, jika identitas nasional yang dimiliki rendah maka hal tersebut dapat berpotensi untuk menguatkan keterikatan pada identitas agamanya sehingga dapat hal ini

dapat berpengaruh pada terjadinya radikalisme. Oleh karena itu, peneliti memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Identitas nasional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.

2.1.6 Toleransi Beragama

Pada teori toleransi beragama, peneliti menguraikan mengenai pengertian toleransi beragama, dimensi toleransi beragama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi beragama.

2.1.6.1 Pengertian Toleransi Beragama

Toleransi didefinisikan sebagai tindakan individu terhadap orang lain yang melibatkan prinsip keadilan, kesetaraan, kepedulian, dan pertimbangan atas penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, atau lebih singkatnya didefinisikan sebagai rasa hormat dan kesetaraan terhadap orang lain yang berbeda ras, etnis, agama, dan kebangsaan (Witenberg, 2007). Hal ini senada dengan definisi toleransi dari Ismail (2014) yang memaknai toleransi sebagai suatu sikap adil, jujur, sikap objektif dan memungkinkan orang lain untuk melakukan hal yang berbeda dengan kita dalam berpendapat, kebiasaan, agama, kebangsaan, maupun etnis. Sementara itu, Sahal, et al., (2018) mengatakan bahwa toleransi adalah kemampuan untuk menghormati sifat, keyakinan, dan perilaku orang lain yang mana mereka dapat hidup dan berdampingan dalam kebersamaan untuk mencapai kepentingan bersama.

Toleransi beragama merupakan sikap dan perilaku dari individu atau kelompok untuk memberikan kebebasan dan tidak menghalangi orang lain untuk memilih keyakinan yang dianutnya, melaksanakan ibadah, dan mengemukakan pendapatnya, meskipun pada dasarnya hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini (Kementerian Agama, 2019). Pendapat ini diperkuat oleh Suparta, et al., (2008) bahwa toleransi beragama dimaknai sebagai usaha untuk menghargai keberadaan suatu agama yang dianut oleh masyarakat tertentu dengan mampu

melaksanakan ibadah keagamaan dengan baik, dapat merayakan perayaan keagamaan dengan aman, mampu menjalankan tradisi berdasarkan agama dengan baik tanpa campur tangan pihak lain, tidak mengganggu kehidupan pemeluk agama lain, dan saling membantu sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama masing-masing.

Berbagai kelompok dalam suatu masyarakat yang berbeda cenderung bersikap toleran terhadap kelompok lain jika mereka melakukan *check and balance*. Jika kita mampu menjaga keseimbangan antarkelompok maka toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dapat bertahan dan terjaga. Dapat dipahami dalam kehidupan beragama, sikap toleran merupakan salah satu persyaratan bagi masyarakat yang ingin hidup bersama dengan aman dan hormat satu sama lain (Ghazali, 2014).

Adanya toleransi yang rendah seringkali diawali oleh percikan atau pemicu yang terjadi di masyarakat. Hal ini karena keharmonisan, kedamaian, dan toleran dalam kehidupan masyarakat dapat berubah menjadi konflik ketika ada suatu kejadian yang bertindak sebagai pemicu. Selain itu, perbedaan prinsip atau keyakinan yang ada pada masing-masing kelompok juga memiliki potensi untuk melahirkan toleransi yang rendah dan tidak jarang dapat mengakibatkan konflik. Sehingga, dapat dipahami bahwa tercapainya kedamaian dan toleransi yaitu ketika tidak ada peristiwa yang menjadi pemicu atau penyulut intoleransi dan konflik (Walt dalam Zulkifli & Sholikatus, 2020).

Dari beberapa pengertian toleransi beragama yang dikemukakan oleh ahli, dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghargai dan menghormati hak orang lain lain untuk mengekspresikan dan menjalankan keyakinannya tanpa adanya gangguan dari orang lain.

2.1.6.2 Dimensi Toleransi Beragama

Dimensi toleransi maksudnya adalah suatu sikap atau tindakan yang merupakan dasar bagi terwujudnya toleransi, khususnya toleransi

terhadap umat agama lain. Berikut ini adalah dimensi toleransi beragama yang dikemukakan oleh Witenberg (2007), yaitu sebagai berikut:

- a. *Fairness*, yaitu bagaimana individu memperlakukan orang lain secara adil dan memiliki hak yang sama sebagai manusia. Individu memandang bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama tidak peduli apakah mereka berbeda suku, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya.
- b. *Empathy*, berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dan emosi yang menyertainya, serta kemampuan untuk membayangkan dan menghayati diri sendiri berada di posisi orang lain.
- c. *Reasonableness*, yaitu memberikan penilaian atas dasar asumsi logis dan rasional kepada individu yang berbeda. Individu yang berpikir secara rasional ditandai dengan ciri-ciri berpikir dinamis dan tidak kaku, tidak memaksakan sesuatu harus terjadi, dan tidak menghalangi individu untuk berkembang yang efektif dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Toleransi Beragama

Menurut Allport (dalam Triyani, 2016) mengatakan bahwa secara garis besar, toleransi yang ada pada individu dapat dikelompokkan dalam tiga faktor utama, yaitu:

- a. Awal Kehidupan

Individu yang memiliki toleransi yang tinggi dilahirkan dan dibesarkan lingkungan yang positif. Individu merasa diterima dan dicintai oleh keluarga dan orang terdekatnya terlepas apapun yang mereka lakukan. Dalam prosesnya, individu dibesarkan dengan penuh perlindungan dan bukan dalam suasana yang penuh ancaman. Sehingga, individu yang memiliki toleransi yang tinggi adalah individu yang tenang dalam menghadapi ancaman dan tidak terjerumus kedalam

konflik. Ketika datang suatu kesalahan, mereka tidak serta merta menyalahkan orang lain, tetapi lebih pada penilaian diri mereka sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap frustrasi. Hal ini diimplementasikan dalam kehidupan mereka yang menunjukkan sikap tidak mudah panik dalam keadaan yang terancam dan tidak menampakkan adanya konflik.

b. Pendidikan

Pendidikan sampai saat ini masih menjadi perbedatan apakah individu yang berpendidikan tinggi otomatis akan menjadi orang yang toleran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Allport, pengetahuan tidak berpengaruh terhadap tingkat toleransi yang dimiliki oleh individu. Namun, dalam prosesnya, di lingkungan pendidikan formal baik di sekolah maupun di kampus, seorang siswa atau mahasiswa akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang kelompok lain. Sehingga, informasi yang mereka peroleh melalui pengamatan langsung yang lebih akurat dan objektif sehingga bias dan stereotip yang dimiliki individu dapat berubah.

c. Kemampuan empati

Toleransi yang tinggi pada individu dapat memberi keuntungan untuk memahami kepribadian orang lain dengan tepat dan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri pada keadaan orang lain. Ketika empati dikembangkan dan digunakan, secara keseluruhan individu tidak tahu persis apa yang orang lain rasakan. Namun, hal tersebut penting bagi individu untuk mencoba membayangkan apa yang dialami oleh orang lain. Pedersen (2007) mengatakan bahwa empati adalah sebuah kemampuan penting yang perlu dikembangkan oleh semua orang untuk maju dan melanjutkan hidup. Dalam

hal ini, kemampuan objektif sangat penting untuk menciptakan hubungan yang efektif dan konstruktif.

Berdasarkan teori toleransi beragama yang telah dijelaskan tersebut, dapat dipahami bahwa toleransi beragama merupakan suatu sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam menghormati hak individu lain untuk memeluk keyakinan agama mereka sendiri dan mengekspresikan agama yang dianutnya. Ketika toleransi beragama yang dimiliki oleh individu rendah maka hal ini dapat berpotensi untuk terjadinya konflik yang kompleks di masyarakat. Terlebih, faktor utama adanya radikalisme yaitu karena toleransi beragama rendah. Individu tersebut beranggapan bahwa pendapatnya selalu benar dan pendapat lain salah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H2 : Toleransi beragama berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme di Kota Semarang

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan berguna bagi peneliti untuk digunakan sebagai acuan atau pembanding untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Basri & Dwiningrum (2019) yang berjudul Potensi Radikalisme di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Politeknik Negeri Balikpapan) bertujuan untuk menganalisis potensi mahasiswa yang memiliki pemikiran radikal. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian campuran, kualitatif dan kuantitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa 380 mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian terdapat 4 mahasiswa (1,04%) yang terindikasi paham radikal berdasarkan indikator dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan indikator keinginan untuk berdirinya negara khilafah, melakukan kekerasan bagi orang lain,

rela mati untuk berjihad, dan tidak setuju dengan pemimpin yang kafir, sudah terdapat pada empat mahasiswa tersebut. Adapun terbentuknya paham radikal pada mahasiswa adalah melalui organisasi di luar kampus.

Kemudian, Supriadi, et al., (2020) melakukan penelitian yang berjudul *Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi dengan menggunakan metode kualitatif*. Adapun temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah berdiri selama Sembilan tahun berikut dengan program-program yang dimiliki dinilai belum mampu mencegah atau bahkan menghilangkan paham radikal yang dapat mengarah pada tindakan terorisme. Adanya sistem lembaga permasyarakatan yang belum memiliki kapasitas untuk program deradikalisasi, mengakibatkan usaha deradikalisasi dari pemerintah masih jauh dari harapan.

Penelitian yang berjudul *The Impact of Radicalism toward National Defense* yang dilakukan oleh Midho, et al., (2017) bertujuan untuk menganalisis akibat radikalisme pada pertahanan negara dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Teritorial Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor melalui manajemen teritorial dalam bentuk Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembinaan Teritorial dan Ketatalaksanaan Pembinaan Teritorial mampu memetakan potensi dan kerawanan wilayah yaitu bidang geografi, demografi, dan kondisi sosial sehingga perkembangan radikalisme dapat dicegah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Albana, et al., (2019) yang berjudul *The Correlation Analysis of Islamic Education (PAI) Learning Outcomes with Religious Tolerance at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)* bertujuan untuk menganalisis korelasi antara hasil belajar PAI dan toleransi beragama. Penelitian ini menggunakan desain kausal dan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Temuan penelitian menunjukkan bahwa toleransi beragama mahasiswa UPI berada pada level

paling toleran yaitu sebesar 61,63%. Toleransi terhadap pemeluk agama lain tertinggi pada tingkat toleransi 60,17%. Toleransi terhadap negara dan pemerintah, sebagian besar berada pada tingkat toleransi sebesar 38,66%. Dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar PAI dengan toleransi beragama pada mahasiswa UPI.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono, et al., (2019) yang berjudul *The Role of Religious Fundamentalism in the Intersection of National and Religious Identities* bertujuan untuk menganalisis hubungan agama dan identitas nasional yang dimoderasi oleh fundamentalisme agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan identitas agama berhubungan positif dengan identitas nasional baik mereka yang mempunyai nilai tinggi maupun rendah dalam fundamentalisme. Selain itu, juga diketahui bahwa lebih banyak aktivis fundamentalis yang lebih mementingkan identitas agama mereka daripada identitas lain seperti identitas nasional dan etnis.

Kebaruan mengenai penelitian yang akan peneliti lakukan dibanding dengan penelitian yang sudah dilakukan yaitu pada lokasi penelitian, belum ada penelitian mengenai studi Pengaruh Identitas Nasional dan Toleransi Beragama terhadap Paham Radikalisme yang dilakukan di Kota Semarang. Selain itu, masalah pada penelitian yaitu mengenai paham radikalisme yang muncul dengan karakteristiknya yang menentang sistem nilai yang telah ada di Indonesia sehingga harus diganti dengan ideologi yang diyakininya. Masalah dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, ditinjau dari variabel yang digunakan dapat dilihat bahwa pada penelitian yang telah dilakukan tidak ada variabel yang sama persis dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu, identitas nasional, toleransi beragama, dan paham radikalisme. Disisi lain, penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yang membahas mengenai radikalisme ini masih sangat sedikit yang menggunakan.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Potensi Radikalisme di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Politeknik Negeri Balikpapan)	Basri & Nawang Retno Ningrum (2019)	Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa indikator radikalisme seperti keinginan mengganti dengan negara khilafah, melakukan kekerasan bagi orang lain, dan rela mati demi berjihad, tidak setuju dengan pemimpin kafir, sudah terdapat pada empat mahasiswa. Adapun terbentuknya paham radikal di kalangan mahasiswa yaitu melalui jaringan organisasi luar kampus.	Kesamaan pada variabel radikalisme	Tidak ada variabel tambahan yaitu identitas nasional dan toleransi beragama. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No.	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi	Endang Supriadi, Ghufron Ajib, & Sugiarso (2020)	Temuan dalam penelitian menunjukkan selama sembilan tahun berdirinya BNPT, program-program yang dimiliki dinilai masih belum mampu menangkal atau bahkan menghilangkan paham radikal yang mengarah pada tindakan terorisme.	Kesamaan pada variabel intoleransi beragama dan radikalisme	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif
3.	<i>The Impact of Radicalism toward National Defense</i>	I Wayan Modhio, Ahwan Ismadi, Ate Ajat Waluyio (2017)	Temuan penelitian menunjukkan pengembangan kawasan Kodim 0621 dilakukan dengan tiga metode yaitu perencanaan sistem dan pengelolaan kawasan pembangunan yaitu dengan melibatkan TNI, komunikasi sosial, dan resistensi terhadap kawasan pembangunan	Kesamaan pada variabel radikalisme	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

Tabel 2.1 (Lanjutan)

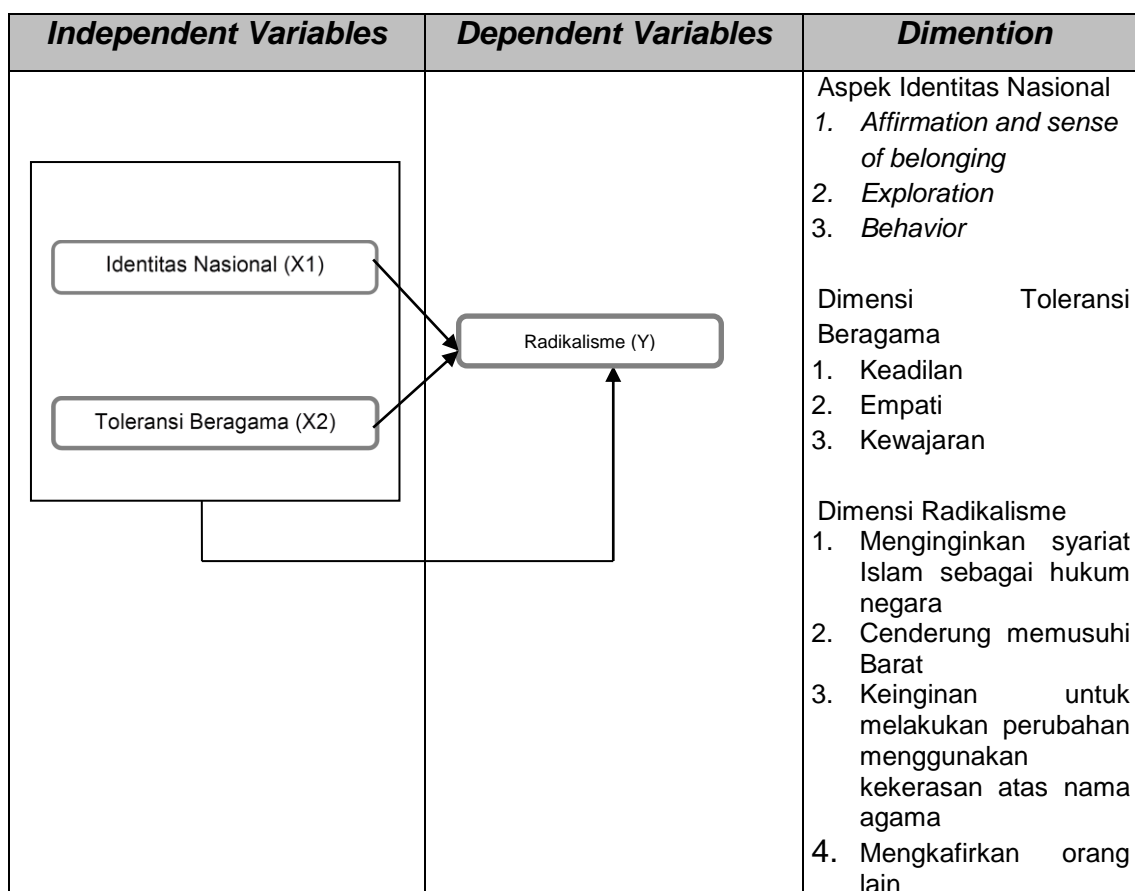
No.	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	<i>The Correlation Analysis of Islamic Education (PAI) Learning Outcomes with Religious Tolerance at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)</i>	Hasan Albana, Abas Asyafah, dan Munawar Rahmat (2019)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa toleransi beragama mahasiswa UPI berada pada level paling toleran yaitu sebesar 61,63%. Toleransi terhadap pemeluk agama lain tertinggi pada tingkat toleransi 60,17%. Toleransi terhadap negara dan pemerintah, sebagaimana besar berada pada tingkat toleransi sebenar 38,66%.	Kesamaan pada variabel toleransi beragama	Perbedaan pada variabel yang digunakan yaitu hasil belajar PAI, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ada variabel tambahan identitas nasional dan radikalisme

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No.	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	<i>The Role of Religious Fundamentalism in the Intersection of Nasional and Religious Identities</i>	Susilo Wibisono, Winnfres Louis, Jolanda Jetten (2019)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa identifikasi agama berkorelasi positif dengan identitas nasional. Selain itu, juga diketahui bahwa lebih banyak aktivis fundamentalis yang lebih mementingkan identitas agama mereka daripada identitas lain seperti identitas nasional dan etnis.	Kesamaan pada variabel identitas nasional	Variabel yang digunakan berbeda dengan peneliti yaitu tidak ada variabel intoleransi dan radikalisme

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian diantaranya adalah teori identitas nasional, teori toleransi beragama, dan teori radikalisme. Sehingga, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Identitas Nasional dan Toleransi Beragama terhadap Paham Radikalisme di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh identitas nasional (X_1) dan toleransi beragama (X_2) terhadap paham radikalisme (Y) secara parsial dan simultan. X_1 dan X_2 merupakan variabel bebas, sedangkan Y merupakan variabel terikat. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identitas nasional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.
- b. Toleransi beragama berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.
- c. Identitas nasional dan toleransi beragama secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.